

Suara Pemilih Di Sumut Harus Dihitung Dan Dihargai

Provinsi Sumatera Utara menjadi panggung penting dalam pesta demokrasi nasional. Di kawasan ini terdapat 10 juta pemilih tetap atau menempati peringkat ke-4 di Indonesia.

Medan | *Mistar*
Pj. Gubernur Sumut Hassanudin

dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemilu Wilayah

di Hotel LePonolia Hotel & Convention Hotel Medan, Kamis (30/11/23) menyampaikan, untuk menyukseskan Pemilu 2024 mendatang, Sumut telah mempersiapkan diri dengan menyediakan 45.875 Tempat Pemungutan Suara

(TPS).

"Dengan jumlah TPS yang signifikan, kami berkomitmen untuk memberikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pemilih. Memastikan bahwa setiap suara terhitung dan menjamin prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Untuk itu, Hassanudin berharap partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk mendukung keberhasilan Pemilu yang akan datang. "Upaya bersama untuk memastikan kredibilitas proses pemilihan adalah tanggung jawab kita semua demi masa depan demokrasi yang kuat di Sumatera Utara," sebutnya.

Dengan komitmen dan persiapan yang matang, lanjut Hassanudin, Sumatera Utara siap menyelenggarakan Pemilu yang bermartabat dan memastikan setiap suara warganya dihargai dan dihitung.

Pemerintah Sumatera Utara juga telah menegaskan pentingnya peran setiap pemangku kepentingan dalam memastikan integritas proses Pemilu. Menjaga kredibilitas, keadilan dan transparansi adalah prioritas utama.

Memantapkan Integritas

Integritas dan kode etik dari para penyelenggara Pemilu memiliki pengaruh besar terhadap kredibilitas hasil Pemilu. Untuk itu, para penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota harus menjaga integritas dan menjalankan tugasnya dengan baik.

"Kredibilitas Pemilu sangat tergantung pada integritas penyelenggara. Jika penyelenggara kredibel, hasilnya pun akan kredibel dan hal ini akan menghindari demonstrasi besar terkait keputusan Pemilu," tegas Hedy Sekretaris DKPP RI, David Yama Hedy, dalam kegiatan yang sama.

"Kita tidak hanya menginginkan hasil Pemilu yang baik secara teknis, tapi juga Pemilu yang bersih secara moral dan etika," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hedy menyoroti perhatian publik yang tinggi terhadap DKPP dan menekankan pentingnya lembaga tersebut menjaga integritas dan etika para penyelenggara Pemilu.

Sebagai bukti, David Yama mengungkapkan, dalam laporan data pertanggal 26 November 2023, terdapat 292 pengaduan yang telah diputuskan menjadi teradu sebanyak 432 orang.

Rinciannya, 73 laki-laki, sementara pengaduan yang masuk dalam persidangan mencapai 133 perkara. Pengaduan yang diterima DKPP berasal dari Tim Pemeriksa Daerah Unsur Masyarakat DKPP.

Menyikapi tingginya angka pelanggaran etik Pemilu 2024 di Sumatera Utara, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, berencana membuka kantor cabang di Kota Medan.

Kantor tersebut sebagai wadah bagi masyarakat untuk melaporkan pengaduan terkait Pemilu 2024. Usulan itu sendiri telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. (*khairul/hm01*)



SAMBUTAN: Pj. Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin saat memberikan kata sambutan dalam Rakor Penyelenggara Pemilu Wilayah I di Hotel LePonolia Hotel & Convention Hotel Medan, Kamis (30/11/23) (*f.khairul/mistar*).